

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Penelitian ini memberikan sejumlah kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, yaitu:

1. Secara bersama-sama ketimpangan gender, TPAK, TPT, kemiskinan dan angka partisipasi sekolah berpengaruh terhadap IPM secara signifikan.
2. Ketimpangan gender tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Hal tersebut menunjukkan setiap kenaikan maupun penurunan ketimpangan gender, tidak akan selalu meningkatkan maupun menurunkan IPM di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020-2024.
3. TPAK tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Hal tersebut menunjukkan setiap kenaikan maupun penurunan TPAK, tidak akan selalu meningkatkan maupun menurunkan IPM di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020-2024.
4. TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan peningkatan TPT cenderung menurunkan IPM di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020-2024.
5. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan peningkatan kemiskinan cenderung menurunkan

IPM di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020-2024.

6. APS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan peningkatan APS akan meningkatkan IPM di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020-2024.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan manusia dipengaruhi oleh keterkaitan antara ketimpangan gender, kondisi pasar tenaga kerja, kemiskinan serta partisipasi pendidikan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pembangunan yang terintegrasi guna meningkatkan IPM berkelanjutan. Berikut implikasi terhadap IPM untuk 22 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Peningkatan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat dicapai melalui kebijakan yang bersifat terpisah. Memerlukan pendekatan antara sektor ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan, dan percepatan pembangunan pendidikan. Signifikannya TPT mengindikasikan perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah untuk membenahi sistem pelatihan tenaga kerja. Pembaharuan Balai Latihan Kerja (BLK) yang disesuaikan dengan potensi lokal seperti hasil pertanian lahan kering dan sektor wisata. Penting untuk dilakukan agar tenaga kerja memiliki keterampilan

yang relevan dengan kebutuhan pasar dan terhindar dari pengangguran.

2. Kemiskinan yang signifikan menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan sosial yang sifatnya sementara. Program perlindungan sosial di NTT perlu di intergrasikan dengan upaya perbaikan kondisi kesehatan dasar khususnya penanganan stunting. Kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi masyarakat yang menentukan umur harapan hidup. Kebijakan perlu di arahkan pada pengendalian harga pangan pokok serta penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM desa. Sehingga peningkatan dapat berlangsung karena perbaikan dimensi ekonomi di NTT.
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) meski positif dan signifikan, masih terdapat persoalan dalam susunan sektor pendidikan. Kesenjangan antara HLS yang telah mencapai 13,01 tahun dan RLS yang baru sebesar 7,85 tahun menunjukkan kendala utama pendidikan di NTT. Terletak kemampuan ekonomi rumah tangga untuk mempertahankan anak bersekolah hingga ke jenjang akhir. Pemerintah perlu memperluas biaya pendidikan bersifat personal seperti penyediaan asrama gratis bagi siswa di wilayah terpencil. Dengan jumlah tenaga pendidik 86.117 orang, arah kebijakan juga perlu menitikberatkan pada pemerataan mutu guru antarwilayah. Sehingga peningkatan partisipasi sekolah benar-benar berimplikasi

pada peningkatan kapasitas produktif individu dan memutus rantai kemiskinan.

4. Kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan masih menjadi penghambat IPM. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan strategi kesetaraan gender melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Baik pada sektor formal maupun perlindungan bagi pekerja perempuan. Meningkatkan kualitas hidup perempuan otomatis akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga secara keseluruhan.
5. TPAK di NTT seringkali tidak dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang layak. Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada “seberapa banyak orang bekerja” tetapi “kualitas pekerjaan” tersebut. Diperlukan intervensi untuk menggeser tenaga kerja di sektor primer (pertanian subsisten) ke sektor sekunder yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karakteristik NTT yang didominasi wilayah kepulauan, lahan kering, ketergantungan tinggi pada sektor pertanian. Serta keterbatasan infrastruktur dan industrialisasi membuat hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural daerah tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder, sehingga sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data yang dipublikasikan oleh

instansi terkait. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain, memperluas pengamatan. Menggunakan pendekatan metode yang lebih beragam untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih beragam seperti OLS, *Two-stage* dan *three stage least squares* (2SLS & 3SLS), *Path Analys*, dan lain sebagainya .

